

## TANTANGAN INTERMEDIASI PERBANKAN 2007<sup>1</sup>

Oleh: Djoko Retnadi, Ekonom Senior, The Indonesia Economic Intelligence, Jakarta

Kinerja perbankan nasional sampai dengan tahun 2006 dianggap belum memuaskan karena masih rendahnya tingkat fungsi intermediasi perbankan yang dicerminkan oleh rasio jumlah kredit yang disalurkan terhadap jumlah simpanan masyarakat yang berhasil dikumpulkan (LDR/Loan to Deposit Ratio). Jika dilihat dari rasio LDR atas dasar posisi, maka LDR September 2006 yang sebesar 61,92% sebenarnya telah membaik dibandingkan dengan LDR Desember 2005 yang hanya sebesar 61,62%. Namun jika angka LDR dilihat dari delta kredit terhadap delta simpanan, maka rasionya sejak tahun 2005 telah berada di bawah 100%, yaitu 82,62% (2005) dan 65,45% (September 2006). Ini berarti bahwa sejak tahun 2005, jumlah dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan oleh perbankan tidak seluruhnya dapat disalurkan ke bentuk kredit.

Sebagai konsekuensi atas rendahnya penyaluran kredit bank tersebut, maka kelebihan likuiditas perbankan akhirnya tertanam di SBI (Surat Berharga Bank Indonesia), di mana di tahun 2005 masih sebesar Rp 54 triliun, meningkat tiga kali lipat menjadi Rp 150,6 triliun di bulan September 2006. Semakin rendah LDR sebuah bank maka bank tersebut diwajibkan untuk meningkatkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia, sehingga praktis likuiditas perbankan akan semakin tersedot oleh Bank Indonesia. Dengan melihat rendahnya tingkat penyaluran kredit di tahun 2005 dan 2006 tersebut tentu perlu dicari letak permasalahan dan alternatif pemecahan masalah ke depan.

### Permasalahan

Beberapa waktu lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla memperingatkan kepada Direksi Bank agar bank lebih banyak menyalurkan kredit dan tidak terlalu banyak menempatkan danaya di SBI. Bahkan, Wapres tidak segan-segan akan mengganti Direksi Bank BUMN yang kurang berani melakukan ekspansi kredit dan lebih banyak menempatkan uangnya di SBI. Jika kita telaah lebih seksama, apakah benar Direksi Bank memang sengaja menempatkan danaya di SBI dan mengabaikan ekspansi kredit?

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, jumlah pertambahan kredit selalu lebih besar daripada dana yang berhasil dikumpulkan bank (LDR Delta di atas 100%) (lihat tabel). Selain itu, rasio nilai SBI terhadap kredit terus menurun, di mana

---

<sup>1</sup> Tulisan telah dimuat di Koran Investor Daily, Senin 8 Januari 2007

tahun 2001 sebesar 23,51%, tahun 2005 hanya sebesar 7,80%, namun di bulan September 2006 meningkat lagi menjadi sebesar 20,19%. Jika dilihat dari jumlah absolut SBI setiap tahun memang terus meningkat, di mana puncaknya terjadi di bulan September 2005 yang mencapai Rp 150 triliun dibandingkan tahun 2000 yang masih sebesar Rp.58 triliun.

Permasalahannya, mengapa bank menempatkan kelebihan likuiditasnya di SBI? Alasan pertama jelas bahwa sampai saat ini suku bunga SBI masih lebih tinggi daripada suku bunga simpanan (baya dana) bank sehingga bank masih memperoleh margin bunga walaupun tipis.

Alasan kedua, perbankan pada saat ini cukup sulit untuk meningkatkan ekspansi kredit seiring dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun.

Seperti diketahui bahwa di setiap awal tahun, seluruh bank wajib menyampaikan rencana ekspansi kredit dan sumber pendanaannya. Dalam praktiknya, penyaluran kredit acapkali sulit dilakukan karena banyaknya variabel penghambat yang dihadapi perbankan selama perjalanan satu tahun. Sebagai contoh, akibat kenaikan harga BBM di bulan Oktober 2005 ternyata berpengaruh signifikan terhadap laju ekspansi kredit perbankan. Di lain pihak, dari sisi penghimpunan dana, berbagai gejolak ekonomi yang terjadi selama ini tampaknya tidak terlalu berpengaruh karena asal-usul dana bank lebih bervariasi, di mana sumber dana dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Sebagai contoh, derasnya arus investasi portofolio asing ke bursa saham maupun obligasi telah menyebabkan beralihnya kepemilikan saham dan obligasi dari kepemilikan domestik ke asing. Masuknya devisa asing tersebut tentunya akan dibelikan rupiah untuk pembelian portofolio saham atau obligasi. Dalam kondisi iklim investasi sektor riil yang belum mampu memberikan "sweetener" kepada pemilik uang, maka limpahan mata uang rupiah dari hasil penjualan saham atau obligasi tersebut akan masuk ke sistem perbankan sambil menunggu perbaikan sektor riil. Akibatnya, dana pihak ketiga perbankan akan meningkat secara drastis, sementara ekspansi kredit tidak dapat dikebut seketika dan tetap mengikuti rencana ekspansi yang ditargetkan.

Demikian pula halnya dengan kondisi yang dialami oleh BPD (Bank Pembangunan Daerah). Sampai dengan September 2005, jumlah SBI yang dimiliki BPD mencapai Rp 46 triliun atau mencapai 180% dari kredit yang disalurkan. Salah satu penyebab besarnya penempatan SBI oleh BPD disinyalir karena adanya dana milik pemerintah daerah yang belum dapat dicairkan untuk pembiayaan proyek. Akibat melonjaknya DPK di BPD ini maka angka LDR BPD per September 2006 menurun drastis menjadi 21% dari posisi 53% di tahun 2005.

Kembali pada permasalahan yang dihadapi perbankan pada umumnya, dalam kasus ini BPD juga tidak mungkin dapat mengimbangi kenaikan DPK dengan serta-merta meningkatkan ekspansi kredit untuk mempertahankan LDR agar tetap tinggi.

Tabel: Kredit, DPK dan LDR 2000-2006 (Rp miliar)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 Sep
Kredit (Rp)	283,097	316,059	371,058	440,505	559,470	695,649	746,406
DPK (Rp)	699,859	797,362	835,778	888,567	963,106	1,127,937	1,205,486
LDR (%)	40.45	39.64	44.40	49.57	58.09	61.67	61.92
Delta DPK (Rp)		97,503	38,416	52,789	74,539	164,831	77,549
Delta Kredit (Rp)		32,962	54,999	69,447	118,965	136,179	50,757
LDR Delta (%)		33.81	143.17	131.56	159.60	82.62	65.45

### Alternatif Solusi

Dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi perbankan, maka perlu dicarikan jalan keluar agar bank dapat meningkatkan fungsi intermediasi melalui peningkatan angka LDR. Langkah pertama adalah dengan menurunkan BI rate sedemikian rendah sehingga suku bunga SBI pada akhirnya akan berada di bawah suku bunga simpanan (biaya dana) perbankan.

Karena SBI adalah investasi bebas risiko (risk free investment) maka sudah sewajarnya jika imbal hasil yang diberikan juga lebih rendah daripada suku bunga simpanan perbankan. Jika kondisi ini dapat diwujudkan maka diperkirakan bank akan segera mengurangi penempatan ekseklikuitasnya ke SBI dan akan beralih ke investasi lain.

Permasalahannya, pertama, apakah pada saat ini ada alternatif investasi lain (di luar kredit) yang masih menarik perbankan? Mengingat cost of doing business di Indonesia dianggap belum menarik, maka cukup sulit mengharapkan para pemilik uang untuk menempatkan uangnya guna membuka usaha di sektor riil. Bagi bank, dengan risiko kredit yang relatif cukup tinggi, akan lebih baik baginya untuk mencari alternatif investasi lain, misalnya penempatan pada antarbank aktiva. Tentunya tidak mudah untuk mengalihkan seluruh SBI yang sebesar Rp 150 triliun ke bentuk investasi lain.

Permasalahan kedua, apabila suku bunga SBI berada di bawah suku bunga simpanan bank, pada level berapa BI Rate harus ditetapkan tanpa menimbulkan terjadinya kemungkinan pelarian modal ke luar negeri? Permasalahan ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila porsi cadangan devisa yang dikuasai BI lebih banyak berasal dari kegiatan investasi langsung atau hasil ekspor dan bukan dari penanaman portofolio jangka pendek. Di masa lalu suku SBI selalu lebih rendah dari pada suku bunga simpanan bank namun pelarian modal tidak terjadi dan kurs rupiah tetap aman. Boleh jadi pada waktu itu porsi cadangan devisa yang dimiliki BI lebih banyak berasal dari komponen utang luar negeri dan penanaman modal langsung yang tidak rentan terhadap perubahan suku bunga SBI. Dengan demikian, solusinya sangat gamblang, apabila investasi di sektor riil menjanjikan imbal hasil yang lebih baik daripada investasi di sektor portofolio saham atau obligasi, maka tidak ada alasan terjadinya pelarian modal ketika terjadi penurunan BI rate.

Langkah kedua, BI perlu mengkaji untuk menetapkan batas rasio maksimum SBI terhadap kredit sebuah bank (misalnya 25%). Dari data perbankan sejak tahun 2000, tampak bahwa rasio SBI terhadap kredit pernah mencapai angka tertinggi sebesar 23,51% di tahun 2001 dengan nilai absolut SBI sebesar Rp 74 triliun. Sedangkan di bulan September 2006 hanya sebesar 20,19% walaupun angka absolut SBI telah menjadi Rp 150 triliun. Jika dilihat dari kelompok bank, maka BPD memiliki angka tertinggi di mana di tahun 2005 mencapai 38% dan di bulan September 2006 mencapai 180%. Apabila BI menetapkan rasio maksimum SBI terhadap kredit, maka bank yang memiliki rasio SBI terhadap kredit di atas ketentuan BI wajib untuk menyalurkan eksekus likuiditasnya ke bentuk investasi lain misalnya obligasi pemerintah atau penempatan antarbank.

Kondisi seperti ini akan jauh lebih baik daripada bank menempatkan eksekus likuiditasnya ke SBI, karena sampai saat ini dana yang berhasil diserap melalui SBI sama sekali tidak dapat tersalurkan kembali ke masyarakat akibat fungsi BI sebagai growth promoting agency dihilangkan, khususnya sejak dihapuskannya fasilitas kredit likuiditas BI. Sedangkan jika eksekus likuiditas bank ditempatkan di obligasi atau penempatan antarbank akan langsung dapat memberikan manfaat karena sumber dana dari obligasi pemerintah atau penempatan antarbank pada akhirnya akan bermuara ke sektor riil juga.

### **Catatan Akhir**

Fungsi intermediasi perbankan di tahun 2007 diperkirakan akan semakin membaik karena berbagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana bisnis bank ke depan berada dalam kondisi

yang lebih baik. Suku bunga BI (BI Rate) yang telah berada di angka 9,50%, tingkat inflasi yang diperkirakan tidak lebih dari 7%, dan nilai tukar yang relatif stabil jelas merupakan kondisi yang kondusif bagi bank untuk dapat merencanakan dan mengimplementasikan bisnisnya. Satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bahwa rencana bisnis bank kemungkinan dapat saja meleset (tidak tercapai) apabila terdapat variabel ekonomi makro yang bergerak melebihi ekspektasi pasar. Oleh karena itu, menjadi tugas semua pihak yang berkompeten untuk tetap menjaga kondisi indikator ekonomi makro agar tetap stabil. Jika kondisi seperti ini dapat berlangsung sepanjang tahun 2007, maka perbankan akan dapat mengembangkan daya kreasinya untuk memilih bisnis yang paling sesuai dengan kompetensi inti mereka.

Sebagai contoh, laju pertumbuhan kredit untuk UMKM yang selalu lebih tinggi daripada laju pertumbuhan kredit secara umum jelas merupakan peluang yang menjanjikan untuk ditekuni. Selain itu, kemungkinan terbukanya peluang pembiayaan infrastruktur, revitalisasi pertanian dan perikanan, dan pembiayaan sektor energi juga akan menjadi sasaran yang bagus bagi bank di era suku bunga rendah.

Singkatnya, jika risiko ke depan terukur dan terkendali sebenarnya tidak perlu ada imbauan apalagi paksaan bagi bank untuk menyalurkan kredit, karena di bidang itulah bank mampu merencanakan dan membangun bisnis yang berkelanjutan. Tentu saja berbagai alternatif solusi di atas dapat segera direalisasikan agar bank tidak lagi berpaling untuk melakukan penempatan dana yang terlalu besar di luar kredit. Jadi untuk apa lagi menyimpan uang di SBI, tak usah lagi lah yauw.